

**KONSEP KEBUTUHAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL
— Suatu Tinjauan Deskriptif Terhadap Kebutuhan
Sosial Masyarakat Maluku dan Tantangannya —
(Needs Assessment Concept and its Role in Social Policy
Analysis: A Descriptive Review on Maluku Community Social
Needs and its Challenges)**

Hobarth Williams SOSELISA

Abstract Needs assessment in policy analysis and challenges of Maluku community in the third millennium is determined by the following factors. First, the desired condition of a target population that needs post-conflict improvement. Second, supporting resources to serve as determinants in decision making process for post-conflict program analysis. In making a policy analysis of a target population, its need are determined by the size of geographical area. In target of policy analysis, needs assessment is the determinant of the social needs of Maluku people and how they move away from the current challenges in such a manner that they can finally make their own decisions. Considering the critical role of needs assessment mentioned above, the purpose of this article is to describe empirically the basic needs of the community in a certain condition, to analyze and plan program intervention. In the context of Maluku, the assessment is focused on 1) community basic social needs and 2) challenges for the Mollucans in the Third Millennium.

Key Word: Need Assessment concept, Place policy, Community third millenium

**1. HAKEKAT DAN TUJUAN
NEEDS ASSESSMENT**

Needs assessment diartikan sebagai suatu cara dalam mengidentifikasi, pengujian dan pemahaman suatu kondisi dan kebutuhan untuk membuat rencana intervensi. Dwi Heru Sukoco (2004) mengatakan bahwa penilaian kebutuhan adalah menyajikan suatu *elaborasi* dari perencanaan yang secara rasional mendapat perhatian yang

mengikat dengan munculnya suatu analisa kebijakan yang dalam fungsinya akan melakukan penkajian dan analisa suatu situasi yang bertujuan melakukan kebijakan untuk pelayanan manusia.

Berdasarkan pernyataan itu, maka permasalahan kebutuhan akan mendapat perhatian serius untuk dideskriptifkan secara mendalam dan akurat, akan dijadikan bahan informasi dalam pembuatan rencana analisa kebijakan maupun untuk tujuan

peningkatan kualitas program intervensi, sehingga analisa kebijakan untuk program intervensi tersebut dapat mencapai sasaran yang sebenarnya sebagaimana yang diharapkan. Terutama bagi mereka yang menjadi objek dari analisa kebijakan dimaksud (masyarakat Maluku).

Bertolak dari apa yang menjadi hakekat *needs assessment* di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan deskriptif dasar secara empirik tentang kebutuhan-kebutuhan dasar dari suatu kondisi serta dianalisa dan direncanakan untuk tujuan program intervensi. Konkritnya bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam *needs assessment* untuk kebutuhan sosial masyarakat Maluku adalah menyangkut dua hal mendasar, yaitu : 1) apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan sosial dari masyarakat Maluku, dan 2) apa yang menjadi tantangan masyarakat Maluku di Millenium ke III.

Dwi Heru Sukoco (1998), mengatakan bahwa *assessment* merupakan penilaian atau penafsiran terhadap situasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. *Assessment* mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu : 1) Membantu mendefinisikan masalah, dan 2) Menunjukkan sumber-sumber yang bertujuan untuk *problem solution*.

Kepentingan analisa kebijakan terhadap sasaran program pelayanan, maka tujuan *needs assessment* itu adalah mengungkapkan apa yang mejadi kebutuhan sekaligus tantangan masyarakat Maluku di Millenium ke III, sehingga akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penetapan alternatif pemecahan masalah dan akan mencerminkan

distribusi kebutuhan yang sesuai.

2. MODEL-MODEL PENGUKURAN NEEDS ASSESSMENT

Untuk menilai kebutuhan-kebutuhan apa yang mendesak dari suatu kondisi permasalahan yang akan dituangkan dalam menganalisa suatu kebijakan untuk perencanaan program layanan, maka ada beberapa model pengukuran dari suatu situasi yang dapat digunakan. Model-model tersebut (William N. Dunn, 2000) adalah sebagai berikut :

- **Model Deskriptif (*Descriptive model*)** suatu model yang disusun untuk tujuan menjelaskan dan/atau memprediksikan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.
- **Model Normatif (*Normative model*)** adalah suatu model yang dirumuskan untuk maksud mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai).
- **Model Perspektif (*Perspective model*)** adalah suatu model yang berfungsi sebagai salah satu dari berbagai cara yang mungkin untuk merumuskan masalah-masalah substantive.
- **Model Prosedural (*Procedural model*)** adalah suatu model yang diekspresikan dalam bentuk prosedur-prosedur elementer yang diciptakan untuk menampilkan hubungan yang dinamis.

Model-model pengukuran kebutuhan di atas, adalah representasi

sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah untuk dideskripsikan dan dilaksanakan sesuai dengan *needs assessment*. Terhadap kebutuhan sosial masyarakat Maluku dan tantangannya di millennium ke III, maka konsep dan kedudukannya adalah untuk menganalisa suatu kebijakan dapat menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi. Selain itu bagaimana memperbaiki-nya, serta merekomendasikan serangkaian tindakan untuk tindakan intervensi terhadap pemecahan masalah orang Maluku menuju Maluku baru yang ideal.

3. METODE-METODE NEEDS ASSESSMENT

Untuk menilai kebutuhan-kebutuhan apa yang paling mendesak dari suatu kondisi permasalahan yang akan dituangkan dalam analisa kebijakan, maka ada beberapa metode pengukuran kebutuhan. Metode-metode tersebut (Miryam, 1990) adalah sebagai berikut :

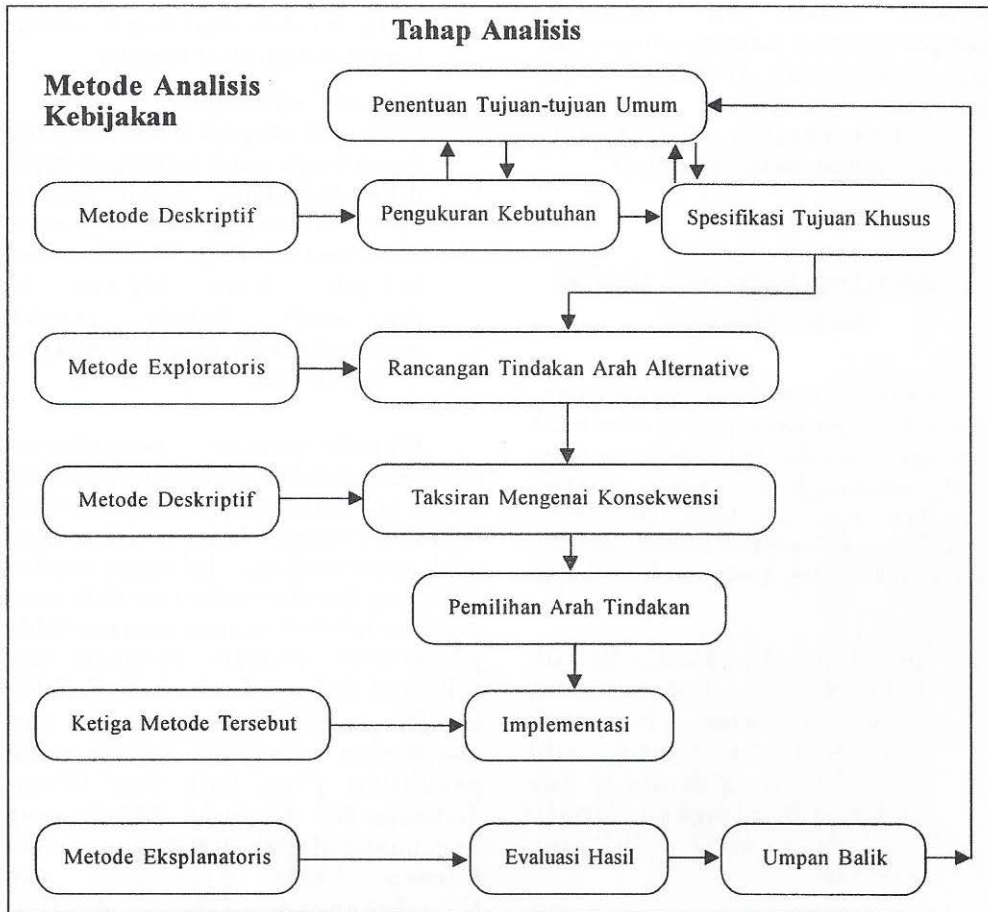
- Pengukuran Kebutuhan Relatif. Suatu metode yang bertujuan untuk mengukur atau menjajaki kebutuhan yang relatif, yaitu kebutuhan yang dianggap ada setelah dibandingkan dengan beberapa situasi/kondisi yang lebih baik.
- Pengukuran Kebutuhan Normatif. Suatu metode yang bertujuan untuk mengukur atau menjajaki kebutuhan secara normatif, yaitu kebutuhan yang diharapkan harus ada. Misalnya kebutuhan akan perumahan yang layak untuk dihuni dan secara normatif ada di masyarakat.
- Pengukuran Kebutuhan Absolut. Suatu metode yang bertujuan untuk mengukur atau menjajaki kebutuhan absolute, yaitu suatu kebutuhan yang bersifat pasti. Misalnya ukuran keadaan miskin atau yang berada pada kondisi pra sejahtera dan sejahtera I akibat konflik berdarah di Maluku.
- Metode Case Fanding. Suatu metode pencatatan terhadap kasus-kasus yang kemudian dapat dikembangkan suatu sistim informasi yang bernilai bagi *needs assessment* untuk perumusan suatu kebijakan baru. Metode ini digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas analisa kebijakan dari sebelumnya.

Metode-metode pengukuran tersebut di atas, kesemuanya memerlukan data yang akurat. Agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam melaksanakan *needs assessment*, ada beberapa sumber data yang dapat memberikan data yang valid, yaitu tokoh agama, para pendidik, pemerintah, praktisi program dan kelompok-kelompok advokasi. Terlebih lagi jika sumber data itu berasal dari masyarakat itu sendiri melalui suatu penelitian yang baik dan benar. Terhadap hal itu, maka metode yang bagaimana dapat digunakan dalam Konsep *Needs Assessment* dan Kedudukannya dalam Analisis Kebijakan Suatu Tinjauan Deskriptif terhadap Kebutuhan Sosial Masyarakat dan tantangannya di Millenium ke III?

Menurut Mayer (1984) ada tiga jenis metode dalam melakukan analisa kebijakan yaitu Metode eksploratif, diskriptif dan ekspalanasi. Khusus tentang *needs assessment* untuk kebutuhan sosial masyarakat Maluku, maka lebih ditekankan ke metode

diskriptif. Agar lebih jelas tentang peranan dari ketiga metode dimaksud dalam setiap pentahapan analisa kebijakan untuk kebutuhan sosial masyarakat Maluku dalam pembuatan kebijakan akan difokuskan pada metode diskriptif, dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Hubungan antara Metode dan Tahap-tahap analisis kebijakan



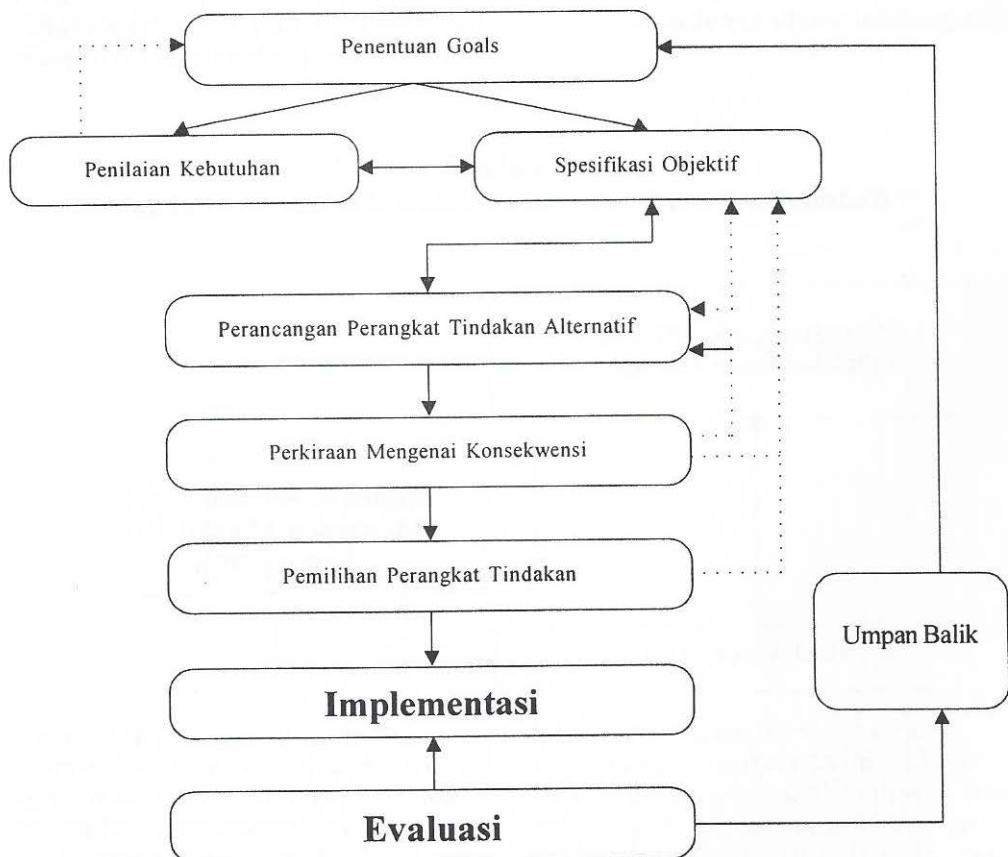
Sumber: Mayer R.K & Grennwood E. 1984.

4. KEDUDUKAN NEEDS ASSESSMENT DALAM ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL

Bertolak dari uraian tentang hakekat, tujuan, model dan metode *needs assessment* di atas, maka dapat dikatakan

Terlihat bahwa kedudukan *needs assessment* dalam analisa kebijakan masyarakat Maluku dan tantangannya di millennium ke III akan ditentukan dalam beberapa hal penting, yaitu :

Gambar 2
Arus langkah langkah proses penyusunan kebijakan



bahwa kedudukan *needs assessment* dalam analisa kebijakan itu adalah sebagai "penentu". Dalam hal mana *needs assessment* itu mempunyai kedudukan sebagai penentu ? dapat dilihat pada gambar 2.

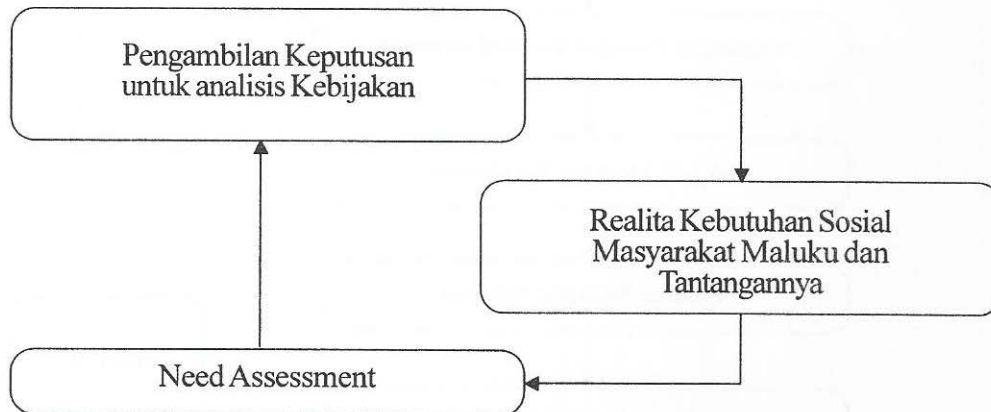
Penentu besarnya atau luasnya suatu kondisi pada suatu populasi tertentu yang ingin diperbaiki oleh pengambil keputusan pasca konflik Maluku.

Penentu perangkat yang akan digunakan (besarnya biaya, waktu, pelaksana dan lain-lain) dalam pengambilan keputusan untuk pembuatan analisa program pasca konflik Maluku.

Analisa kebijakan suatu kondisi yang disebut populasi target, maka penetapan kebutuhan-kebutuhannya berdasarkan luasnya wilayah merupakan dasar yang cukup untuk pengambilan suatu keputusan.

Sedangkan pada tingkat sasaran dari analisa kebijakan, dapat dikatakan bahwa *needs assessment* itu berkedudukan sebagai penentu tentang apa saja yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat Maluku. Bagaimana pula masyarakat Maluku keluar dari tantangan yang mereka hadapi pasca konflik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berhasil dan menjawab tujuan dimaksud. Kedudukan *needs assessment* sebagai penentu untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan dapat dilihat visualisasinya pada gambar 3.

Gambar 3
Kedudukan Needs Assessment Dalam Analisis Kebijakan.



Needs assessment dikatakan sebagai penentu, mengandung pengertian bahwa semua data yang berhubungan dengan kebutuhan suatu situasi yang kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan dari suatu analisa kebijakan untuk tujuan intervensi. Misalnya apa yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat Maluku dan bagaimana mengatasi tantangannya

serta alternatif mana yang akan digunakan untuk tujuan intervensi. Kesalahan/kekeliruan dalam melaksanakan *needs assessment*, maka akan terjadi kesalahan dalam menganalisa. Pengambilan keputusan untuk analisa program dan mengakibatkan kesalahan dalam intervensi sehingga apa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat Maluku tidak terpenuhi begitupun sebaliknya.

5. KONSEP KEBUTUHAN

Berbicara mengenai konsep kebutuhan (*need concep*), maka tidak terlepas dari dimensi-dimensi kebutuhan itu. Banyak pakar menyebutkan berbagai dimensi yang terdapat dalam konsep kebutuhan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam konteks analisa kebijakan untuk tujuan program intervensi, maka konsep kebutuhan itu akan sangat bermanfaat untuk menjawab tiga hal penting, yaitu: 1) apa yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat Maluku menuju Maluku baru yang ideal, dan 2) siapa saja yang menjadi target sasaran, siapa pelaksananya, alternative pelayanan sosial apa yang digunakan dan apa akibatnya; serta 3) bagaimana tantangan bagi masyarakat Maluku di Millenium ke III.

Kebutuhan dimaksud akan sangat beraneka ragam baik pada tingkat individu, kelompok atau masyarakat, mulai dari kebutuhan yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup sampai dengan kebutuhan psikologis, emosional dan sosial.

Bradshaw dalam Koltner (1990) membedakan empat tipe kebutuhan yaitu :

- **Normative Need;** menunjukkan kebutuhan dari suatu kondisi masyarakat yang didasarkan atas norma-norma, nilai-nilai atau tradisi tertentu yang telah berlaku di masyarakat itu.

- **Perceived Need;** menunjukkan kebutuhan yang didasarkan atas ide-ide yang memerintahkan atau memaksakan untuk dipenuhinya dalam keberfungsiaan yang dapat diterima.
- **Expressed Need;** menunjukkan suatu kebutuhan yang hampir sama dengan perceived need, artinya didasarkan atas ide, namun kebutuhan ini lebih memaksakan adanya suatu usaha yang harus dan segera dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.
- **Relative Need;** menunjukkan suatu kebutuhan yang relative sama pada suatu situasi tertentu, artinya tingkatan ide secara signifikan berada dalam tingkat rata-rata atas kondisi tersebut dan mempunyai ukuran yang sebanding.

Pada umumnya apa yang menjadi kebutuhan manusia sering tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang berasal dalam diri pribadi individu, keluarga atau masyarakat itu sendiri. Atau yang datang dari lingkungan atau sistem sosial dimana mereka berada (nilai-nilai budaya, kondisi alam, pertumbuhan penduduk, situasi politik dan kondisi ekonomi).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa adanya dua karakteristik utama yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan yaitu factor lingkungan (*factor eksternal*) dan dari dalam diri pribadi individu, kelompok dan masyarakat itu sendiri (*factor internal*). Kedua karakteristik ini dapat saja menjadi faktor pendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, namun juga bisa menjadi faktor penghambat pemenuhan kebutuhan itu. Dalam menentukan

analisa kebijakan terhadap kebutuhan social masyarakat Maluku dan tantangannya di millennium ke III, maka kedua faktor ini yang harus dikedepankan untuk konsep dan kedudukan *needs assessment*. Agar kebijakan sosial yang dihasilkan dalam bentuk pelayanan-pelayanan sosial merupakan keputusan yang tepat.

6. ANALISIS KEBUTUHAN SOSIAL MASYARAKAT MALUKU DAN TANTANGANNYA

Millenium ke III sudah banyak dipercakapan dalam diskursus ilmiah. Jargon yang digunakan adalah Abad XXI, atau era Post Modernisme, Era Globalisasi dan atau sebutan lainnya. Ada beberapa peristiwa penting yang menandai awal abad baru serta tata dunia baru dengan permasalahan dan tantangan yang baru.

Peristiwa dimaksud merupakan tahapan peradaban bangsa-bangsa di planet ini yang harus dihadapinya yakni perdagangan bebas melalui kesepakatan AFTA (2003), APEC (2010) dan GATT/WTO (2020).

Bagi Indonesia, terutama "Indonesia Luar" (*The "Outher Island"*) termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang kaya akan sumber daya alam terutama laut, perdagangan bebas memberi peluang investasi untuk mobilisasi sumber daya laut dan pesisir. Investasi tersebut harus dilaksanakan dalam konteks "*induce development* yang mendorong difusi teknologi argo industri pertanian dan kelautan yang mencakup: pendidikan dan pemberdayaan sosial, pembangunan

infra struktur, pemantapan jaringan-jaringan transportasi antar pulau baik laut maupun udara menggeser (reformasi) kebijakan perdagangan yang terlampau "*central oriented*" ke arah "*regional oriented*" tetapi dalam bingkai "Wawasan Nusantara" (Sondakh. 1996)

Implementasi dari pada bentuk-bentuk perdagangan bebas ini tentunya akan membawa dampak positif sekaligus juga dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bangsa dan Negara lebih khusus Daerah Maluku dan perlu di implementasikan kepada masyarakat Maluku itu sendiri.

Jusman Iskandar (2004) mengemukakan bahwa sejak krisis moneter dan ekonomi tahun 1997 yang lalu. Bangsa Indonesia mengalami masalah-masalah sosial yang bersifat kritis antara lain kemiskinan absolut, pengangguran yang luas, disintegrasi sosial, deprivasi sosial, konflik etnis, korupsi, kekerasan oleh negara, gerakan separatisme, kriminilitas, massa pengungsi yang semakin besar, marjinalisasi, *the lost generation*, ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial dan lain-lain. Kesemuanya merupakan dampak negatif dari pembangunan dengan kedinamikannya.

Berbicara mengenai dinamika sosial masyarakat Maluku di Millenium ke III, mesti memperhatikan multi aspek didalamnya. Dinamika sosial mencakup berbagai kondisi sosial, baik fisik matrial (Institusi sosial) maupun non matrial (norma dan premis sosial mayor atau masalah social masyarakat seperti kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan lain-lain). Kejelasannya jika difokuskan di Maluku, latar belakang sosial masyarakat mesti

mengemuka. Artinya masyarakat Maluku sarat akan falsafah budaya dan bahkan tidak bisa terhindar dari dinamika religiositas masyarakat itu sendiri.

Cooley dalam pandangannya selalu mengedepankan dua institusi yaitu agama dan sosial secara *co-inside*, bukan hanya *co-eksisteece*. Dua institusi yang sulit dipisahkan walau masih bisa dibedakan hubungan distansi.

Jusman Iskandar (2004) menyatakan bahwa semua agama besar menekankan kebajikan seperti kejujuran dan cinta sesama. Kebajikan ini sangat penting bagi keteraturan perilaku manusia dan agama membantu manusia memandang serius kebijakan seperti itu untuk suatu perubahan.

Berdasarkan kedua pandangan di atas, yang menjadi sasaran bagi masyarakat Maluku. Tentunya adalah untuk mengajarkan kebajikan seperti kejujuran dan cinta sesama, sehingga apa yang akan menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Sebaliknya jika hal ini tidak diperhatikan untuk mengantisipasi dan mengklasifikasi kebutuhan apa yang harus menjadi prioritas dalam tahap ketidaktertenteraman (*unrest*), karena ketidakpastian dan ketidakpuasan dengan sikap agresivitas. Mungkin saja konflik akan terjadi dan berubah menjadi kekerasan jika : **Pertama**, saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai. **Kedua**, suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan tidak didengar dan diatasi. **Ketiga**, banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih

luas. Jika hal ini disadari atau tidak akan membuat masyarakat Maluku menjadi tidak stabil.

Efek sederhana yang akan dialami adalah terhalangnya kreativitas untuk berpikir, untuk menjalin hubungan dan bertindak. Lebih drastis lagi, sikap agresivitas dapat muncul dalam bentuk perilaku yang jahat terhadap masyarakat maupun kelompok-kelompok lain yang bisa dijadikan legitimasi untuk menciptakan konflik baru.

Carolina Nitimihardjo (2002) mengatakan bahwa sikap agresivitas merupakan satu indikasi dari satu kenyataan kolektif yang ada. Artinya, masyarakat Maluku dewasa ini semakin menguat tingkat agresivitasnya di dalam bertindak. Ciri agresivitas adalah didominasi oleh emosi, sehingga di dalam bertindak kurang dipengaruhi oleh rasio. Secara psikologis, perilaku agresif adalah perilaku yang bertujuan menyakiti orang atau kelompok lain yang muncul karena adanya rasa dendam.

Berdasarkan pandangan di atas maka realitas kekinian Maluku perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan peran serta tokoh-tokoh agama dari ke dua komunitas untuk tetap menjaga kondisi yang semakin hari menjanjikan kenyamanan, keadilan, keharmonisan, kedamaian untuk bersatu dan bermartabat. Menciptakan komunikasi antar kedua komunitas yang bertikai agar mereka saling berinteraksi dan berhubungan. Selanjutnya merasa saling membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menciptakan komitmen untuk membangun masyarakat Maluku yang ideal, sehingga

keluar dari ciri agresivitas itu. Di lain sisi mendorong keberdayaan masyarakat Maluku mengupayakan untuk membangun dialog-dialog yang luas di kalangan warga komunitas Maluku di berbagai lapisan : bawah, menengah, dan atas. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam mesikapi kondisi kekiniaan Maluku.

Pendek kata untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu kebijakan sosial. Sekaligus mencari solusi dalam rangka mewujudkan masyarakat Maluku yang ideal. Sisi yang lain melihat indikasi fenomena kesejahteraan sosial dalam bingkai konsep *Needs Assessment* dan kedudukannya untuk kebutuhan sosial masyarakat Maluku dan tantangannya Pasca Konflik Maluku.

7. SOSIAL WELFARE SEBAGAI MASALAH SOSIAL

Pasca Konflik Maluku mengindikasikan adanya berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, tidak ada rumah (*shelterless*), trauma, depresi, cacat fisik, dan gejala penurunan kesehatan lainnya. Menurut Ilmu Kesejahteraan Sosial, mereka ini perlu ditolong untuk keluar dari segala permasalahan yang melingkupinya dan tindakan yang harus dilakukan adalah intervensi pelayanan sosial.

Tujuan intervensi pelayanan sosial adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial baik individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka terlepas dari segala permasalahannya baik secara internal

(yang hidup dalam hunian pengungsian) maupun eksternal (keluar dari hunian pengungsian), sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana layaknya. Adapun mengenai konsepsi teoritik penanganan masalah kesejahteraan sosial akan sangat tepat apabila memperhatikan kedua aspek dimaksud.

Kurt Lewin menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari person dan lingkungannya. Artinya pola interaksi yang baik dalam hunian pengungsian adalah merupakan suatu pengejawantahan perilaku individu, kelompok dan masyarakat. Suatu upaya untuk membangun relasi yang serasi dalam lingkungan pengungsian itu. Kejelasannya semakin baik interaksi dalam hunian pengungsian, semakin baik pula relasi yang dibangun dan kenyamanan, keamanan dalam lingkungan pengungsian akan semakin terasa dan terjaga.

Masyarakat Maluku pasca konflik diliputi dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial. Mereka sulit memenuhi standar kehidupannya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ada yang menghadapi masalah kesehatan, baik cacat fisik atau gejala penyakit lainnya khususnya mereka yang berada pada hunian pengungsian. Mereka dalam kategori ini, mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan kesulitan pengobatan atau pelayanan medical maupun kerohanian berkaitan dengan penyakit yang dideritanya.

Disamping itu pelaksanaan program pertolongan terhadap mereka cenderung terbatas dan tidak intensif. Artinya mereka yang hidup pada hunian pengungsian akan berhadapan dengan

intervensi sosial yang dilakukan lembaga-lembaga sosial nasional dan Internasional kepada upaya membantu pemecahan masalah kesejahteraan sosial untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup.

Tantangan sebagai wujud ideal masyarakat Maluku pasca konflik Maluku adalah terwujudnya masyarakat yang damai, aman, adil, sejahtera, bersatu dan bermartabat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya masyarakat Maluku yang ingin diejawantahkan dalam kedamaian dimana tidak ada lagi keadaan bermusuhan yang diwali oleh kesediaan untuk saling memaafkan setelah ada penegakan hukum (*low enforcement*). Aman, berarti masyarakat Maluku dimanapun berada, khususnya yang berada di Maluku bebas dari bahaya atas keselamatan jiwa dan harta bendanya akibat konflik horizontal antar sesama anak suku bangsa Maluku. Adil artinya, setiap anggota masyarakat Maluku memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya.

Sejahtera berarti, masyarakat Maluku secara holistik dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder berdasarkan pengelolaan sumber daya daerah secara bertanggung jawab. Bersatu, dimana masyarakat Maluku telah bersatu-padu dalam ikatan komunitas masyarakat Maluku dengan tetap menghormati pluralitas yang ada dan hidup di Maluku. Bermartabat dimana, masyarakat Maluku selalu ingin meningkatkan harkat kemanusiaan (harga - diri) nya dengan berdasarkan pada sikap profesionalisme yang bermoral. Di Dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berarti, setiap upaya perwujudan tidak akan mengarah pada proses disintegrasi bangsa yang harus di refleksikan untuk melahirkan keputusan-keputusan sosial (*social deal*) maksudnya suatu upaya menuju masyarakat yang damai, aman,adil, sejahtera, bersatu dan bermartabat merupakan kehidupan hidup yang perlu dipenuhi.

9. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1 Simpulan

Kebijakan sosial adalah se-perangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*frame work*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) atau strategi. Dirancang untuk menterjemahkan kebijakan pemerintah kedalam program tindakan (tindakan intervensi), untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai wujud untuk pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat Maluku pasca konflik.

Bahwa konsep dan kedudukan *needs assessment* merupakan penentu terhadap kebutuhan sosial masyarakat Maluku pasca konflik Maluku dengan memperhatikan gambar 1,2 dan 3 pada satu sisi. Di sisi yang lain harus pula membangun kekuatan sistem sosial yang kuat di kalangan warga komunitas Maluku di berbagai lapisan :bawah, menengah dan atas. Sangat diperlukan pendekatan yang komprehensif demi mewujudkan masyarakat Maluku yang ideal, sehingga apa yang menjadi kebutuhan akan terpenuhi baik secara *normative need*, *perceived need*, *expressed need* dan *relative need*.

Masyarakat Maluku memiliki roh naluri kemanusiaan terhadap pengembangan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk membangun Maluku yang ideal. Meletakkan budaya **Pela dan Gandong** sebagai piranti yang diejawantahkan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**.

9.2 Rekomendasi

Realitas kekinian Maluku perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan peran serta tokoh-tokoh agama dari ke dua komunitas Islam dan Kristen. Kondisi yang semakin hari menjanjikan kenyamanan, keadilan, keharmonisan, kedamaian yang telah menyatu dalam satu kesatuan masyarakat Maluku. Harus dijaga dengan menciptakan komunikasi antar kedua komunitas yang bertikai agar mereka saling berinteraksi, berhubungan untuk selanjutnya merasa saling memiliki dan membutuhkan untuk membangun Maluku yang ideal.

Memberdayakan masyarakat Maluku dengan mengupayakan untuk membangun dialog-dialog yang luas dikalangan warga komunitas Maluku, diberbagai lapisan : bawah, menengah, dan atas. Upaya ini juga dimasukkan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam mesikapi kondisi kekiniaan Maluku.

Relasi keberagaman harus pula menjadi perhatian dari ke dua komunitas dengan melibatkan peran serta tokoh-tokoh agama dan menjadikannya sebagai piranti untuk dibangun dalam fondasi plural dan pendasarannya diletakkan dalam budaya **Pela-Gandong**.

PUSTAKA ACUAN

- Conyers D. (1992) *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta GMU Press.
- Dunn William N. (2000) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Edisi Kedua), Yogyakarta GMU Press.
- Iskandar Jusman, (2004) *Teori sosial*. (Edisi ketujuh), Bandung Puspaga.
- _____, (2002) *Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial Kritis di Indonesia*, IPSPI Jakarta.
- Koltner Peter M. (1990) *Desingning and Managing Programs - And effectiveness-Based Approach*, London, New Delhi. Sage Publication, The International Professional Publisher Newbury Park.
- Lewin, K. (1936) *Principles of Topological Psychology*. New York. London : Mc Graw-Hill Book.
- Mayer R.T & Greenwood E (1984) *Rancangan Penelitian kebijakan Sosial*, Pustekom Diknas & CV Rajawali, Dalam rangka project (USAID)
- Marasabessy Suaidi, (2002) *Tuntutan Perubahan Sosial di dalam Masyarakat Maluku Pasca Konflik*. Ambon.
- Nitimihardjo Carolina, (2002) *Paradigma Baru Kesejahteraan sosial dalam Konteks Integrasi Sosial*, IPSPI Jakarta
- Poloma Margaret M, (1984) *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta; Rajawali.
- Sukoco Dwi Heru, (1998) *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, Bandung; KOPMA STKS

Makalah-Makalah

Miryam S.V.N, (1990) *A n a l i s a Kebijakan Sosial*, makalah, disampaikan pada Pelatihan Pekerjaan Sosial (PKPS) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Sosial (SPLTS) Pusdiklat Pegawai DEPSOS RI, Lembang Bandung.

Simanungkalit, A. (1996) *Agenda Pengembangan Sistem Pendidikan Tinggi*, Makalah disampaikan KSN GMKI di Ambon, Oktober 1996.

Sondakh, L. (1996). *Kawasan Timur Indonesia Pada Era Liberalisasi Perdagangan*. Perjalanan Panjang Konvergensi Regional. Konfrensi Nasional GMKI di Ambon, Oktober 1996.

Sukoco, Dwi Heru, (2004) *Materi Kuliah Analisis Kebijakan Sosial dan Perencanaan Sosial*, Program Pascasarjana STISIP Widuri Jakarta (tidak dipublikasikan)

Hobarth Williams Soselisa.

Staf Pengajar Jurusan Kesejahteraan Sosial. FISIP. Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon.